

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wacana pemikiran Islam tentang sistem pemerintahan Islam mengalami sebuah dinamisasi terutama setelah semakin banyaknya pergolakan pemikiran yang menyebabkan semakin memperkaya khasanah intelektual Islam. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya paradigma pemikiran agama dan politik yang mulai diteliti kembali hubungannya. Hegemoni pemikiran Barat dan isu perang terhadap Islam semakin menggiatkan para cendekiawan muslim untuk memperkenalkan kembali khasanah Islam yang banyak terpengaruh oleh pemikiran Barat. Fakta kemajuan bangsa-bangsa di luar Islam pun menjadi salah satu pendorong cendekiawan muslim untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran Islam yang mampu menyaingi pemikiran-pemikiran Barat. Pada perkembangan selanjutnya semangat pembaharuan pemikiran tersebut, khususnya wacana sistem pemerintahan Islam mengalami dinamisasi internal. Hingga muncul adanya pemikiran yang beragam dari para cendekiawan muslim.

Berkaitan dengan pemikiran Sistem Pemerintahan Islam, Imam Khomeini berpendapat bahwa sistem pemerintahan Islam memiliki karakteristik yang unik, seperti dikemukakannya bahwa :

”Karakteristik pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Pembuat Undang-undang suci ini (Allah SWT) dalam Islam adalah satu-satunya kekuasaan legislatif. Tidak ada seorang pun yang berhak membuat Undang-Undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum dari pembuat undang-undang (Allah SWT). Atas dasar inilah dalam sebuah pemerintahan Islam, Badan Majelis Perencanaan mengambil peran sebagai Majelis Legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga cabang dari pemerintahan yang ada saat ini (legislatif, eksekutif, yudikatif). Majelis ini menyusun program-program bagi departemen (kementerian) di dalam kerangka aturan-aturan Islam dan dengan cara demikian majelis ini akan menentukan bagaimana kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh negara kepada masyarakatnya (Khomeini, 2002:58).

Imam Khomeini adalah salah seorang cendekiawan muslim dan ulama yang berpengaruh di Iran dan Timur Tengah. Perjuangannya tidak hanya pada ranah agama dan ilmu saja, ranah politik menjadi konsentrasi utama perjuangannya. Kenyataan bahwa sistem pemerintahan yang terjadi jauh sekali dari sentuhan Islam dan sebaliknya, pemerintah Shah Reza Pahlevi adalah boneka AS di Timur Tengah, menjadi sebab semakin fokusnya Imam Khomeini dalam perjuangan politik. *Kasful Asrar* menjadi salah satu karyanya yang berisi kritikan terhadap kebijakan-kebijakan Shah Iran dan opininya terhadap perlunya penegakan hukum-hukum Islam dalam pemerintahan. Tanpa adanya pemerintahan, berarti tidak ada hukum dan peraturan. Tanpa adanya hukum dan peraturan berarti tidak ada keamanan untuk hidup dan juga keutuhan aset atau properti milik masyarakat. Karena pada dasarnya manusia dikaruniakan properti dan tak seorang pun di dunia ini yang memiliki hak untuk mengambilnya dari seseorang, dan hukum suci dari Allah pada dasarnya melindungi seluruh properti pribadi manusia dan tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat bertentangan dengan hukum suci tersebut.

Sikap politiknya yang keras menentang Shah Iran mendapat sambutan hangat dari rakyat terutama pemuda dan mahasiswa. Savak, tim intelejen/polisi rahasia Shah Iran tidak menjadi halangan, bahkan beberapa kali Imam Khomeini dijebloskan ke dalam penjara dan diusir dari Iran, namun hal tersebut tidak memisahkan antara Imam Khomeini dan para pendukungnya. Keberanian rakyat untuk menentang Shah Iran tidak lepas dari upaya perjuangan Imam Khomeini dalam menumbuhkan keyakinan dan semangat revolusinya untuk kembali menegakan sistem pemerintahan Islam.

Apa yang dilakukan Imam Khomeini tidak lepas dari apa yang dipahaminya dari ajaran Syiah. Asas-asas doktriner seperti imamah, valayat dan jihad. Ajaran Syiah juga berhubungan dengan otonomi keuangan lembaga keagamaan dari negara. Dalam bukunya

Islamic Government, yang menjadi sumber doktrin revolusi Iran, Imam Khomeini menuduh para mujtahid di Iran hanya puas dengan diri mereka sendiri dengan menulis risalah-risalah praktis tentang masalah-masalah teknis peribadatan dan moralitas pribadi. Imam Khomeini pun menyatakan bahwa perbandingan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan masalah-masalah sosial dengan ayat-ayat mengenai ibadah adalah 100 lebih dibanding 1. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Syiah selama beberapa abad terakhir berdiam diri dalam pemerintahan. Beberapa hal yang menyebabkan kelompok Syiah berdiam diri, dalam Yamani (2003:104) adalah karena 1. Konsep quietisme bukan aktivisme, 2. Konsep *ruj'ah* (kembali) yaitu kembalinya Imam Mahdi, dan selama Imam Mahdi belum datang maka kelompok Syiah hanya mampu menunggu, 3. Konsep *taqiyyah*, yaitu menyamarkan keyakinan keSyi'ahan mereka yang mampu menyelamatkan mereka dari kepunahan dan berkembang secara alami. Ketiga hal tersebut memberikan konsekuensi, tidak ada gunanya melakukan upaya untuk merebut kepemimpinan, karena upaya tersebut tidak akan berhasil. Dari sini kelompok Syiah cenderung memisahkan diri dari pemerintahan dengan hidup dalam komunitas tertutup, dan kondisi seperti ini menjadikan kaum Syiah menjadi independen dari politik pusat kekuasaan.

Imam Khomeini sebagai salah satu cendekiawan muslim dan politikus muslim Syiah mendobrak konsep quietisme, bahwa mereka harus bertindak sebaliknya, yaitu dari harus menunggu secara pasif (para pengikut Imam Mahdi), harus bersikap aktif dalam mempersiapkan "panggung" bagi kemunculan kembali Imam Mahdi. Dengan kata lain, Imam Mahdi tidak akan muncul kembali secara anakronistik di panggung sejarah. Hal itu hanya akan terjadi jika masyarakat sudah siap untuk dipimpinnya dalam merebut kekuasaan di muka bumi. Revolusi doktrinal inilah yang mentransformasikan quietisme Syiah menjadi aktivisme revolusioner. Pada tahun 1979 Revolusi Islam yang dipimpin Ayatullah Khomeini

mendirikan sebuah Republik Islam, sehingga nama lengkap Iran saat ini adalah Republik Islam Iran.

Dewasa ini, Iran menjadi negara yang menarik perhatian perpolitikan internasional. Bentuk negara Republik Islam Iran yang memadukan antara ideologi Islam dan kemajuan Sains (teknologi nuklir) menjadi ancaman baru bagi dunia Barat. Namun Republik Islam Iran yang dicetuskan oleh Imam Khomeini tetap mempertahankan prinsip revolusionernya dan tidak terpengaruh oleh ancaman Barat. Kekonsistenan Iran menjadikan Republik Islam Iran ini menjadi negara yang maju dan diperhitungkan oleh dunia internasional.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemikiran Imam Khomeini tentang sistem pemerintahan Islam yang merupakan suatu terobosan baru bagi perpolitikan dunia menjadi suatu hal yang sangat menarik untuk dikaji. Peneliti mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul ” Pemikiran Imam Khomeini Tentang Wilayatul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran”.

1.2 Rumusan dan Pembatasan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana Pemikiran Imam Khomeini tentang Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan Islam”.

Adapun batasan masalahnya yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang kehidupan, Pendidikan dan politik Imam Khomeini?
2. Bagaimana konsep Wilayatul Faqih dalam sistem pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini?
3. Bagaimana aplikasi dari konsep Wilayatul Faqih pada pemerintahan Republik Islam Iran?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana pemikiran Imam Khomeini tentang Wilayatul Faqih dalam Sistem Pemerintahan di dalam Islam, adapun tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana latar belakang kehidupan, pendidikan dan politik Imam Khomeini
2. Menjelaskan konsep Wilayatul Faqih dalam system pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini
3. Menjelaskan aplikasi dari konsep wilayatul faqih dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran

1.4 Metode Penelitian

Metode adalah prosedur, teknik atau cara-cara yang sistematis dalam melakukan suatu penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan objek (Sjamsuddin, 2007: 13). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode historis atau metode sejarah. Sjamsuddin mengartikan metode sejarah sebagai suatu cara bagaimana mengetahui sejarah. Skripsi ini menggunakan metode historis karena permasalahan yang diangkat adalah permasalahan sejarah.

Sjamsuddin (2007: 89) mengungkapkan beberapa langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah yaitu.

1. Memilih judul atau topik yang sesuai.
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik.
3. Membuat catatan yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah berhasil dikumpulkan (kritik sumber).

5. Menyusun hasil penelitian ke dalam suatu pola yang benar atau sistematika tertentu.
6. Menyajikan dan mengkomunikasikannya kepada pembaca dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian, sehingga dapat dimengerti.

Dari keenam langkah tersebut, tahapan memilih topik, menyusun semua bukti-bukti sejarah dan membuat catatan termasuk pada langkah heuristik, sedangkan mengevaluasi semua bukti-bukti sejarah termasuk tahap kritik dan terakhir menyusun hasil penelitian serta menyajikannya termasuk tahap historiografi (Sjamsuddin, 2007 : 90). Ketiga tahapan diuraikan sebagai berikut:

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber-sumber Sejarah)

Merupakan tahapan awal, dengan cara mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan masalah atau judul yang akan dikaji. Peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

2. Kritik Eksternal dan Internal (menilai sumber sejarah)

Tahap lanjutan dari heuristik, dalam tahapan ini peneliti mulai melakukan penilaian atau pengkajian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh. Tugas seorang sejarawan adalah mencari dan menemukan kebenaran, yang akan berguna dalam merekonstruksi suatu peristiwa. Kritik yang dilakukan ini mencakup dua aspek yaitu aspek eksternal yang digunakan untuk menilai otentisitas sekaligus integritas dari sumber-sumber sejarah yang telah diperoleh melalui proses heuristik. Aspek internal peneliti menggunakan untuk melihat dan menguji dari dalam reliabilitas dan kredibilitas isi dari sumber-sumber yang telah diperoleh.

3. Interpretasi (menafsirkan sumber sejarah) dan historiografi

Peneliti memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah atau data-data yang diperoleh dari hasil kritik eksternal maupun internal. Fakta-fakta dihubungkan dan

disusun kemudian dianalisis sehingga diperoleh penjelasan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Setelah melakukan proses analisis terhadap fakta-fakta yang ada, peneliti kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan yang disebut historiografi. Historiografi merupakan proses penyusunan seluruh hasil penelitian ke dalam bentuk tulisan.

1.5 Teknik Penelitian

Peneliti menggunakan teknik studi litelatur atau studi kepustakaan dan studi dokumentasi dalam penelitian ini. Studi litelatur digunakan untuk mengumpulkan fakta-fakta dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan majalah yang dapat membantu peneliti dalam memecahkan masalah yang akan dikaji. Adapun studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen baik tertulis/visual maupun dalam bentuk audio visual. Sumber-sumber yang telah terkumpul, kemudian peneliti kaji dan pelajari sesuai dengan langkah-langkah dalam penelitian sejarah seperti yang telah dijelaskan di atas.

1.6 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun ke dalam lima bab, yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Pembahasan, dan terakhir Kesimpulan. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan dan sistematisasi dalam memahami penulisan.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah yang di dalamnya termuat penjelasan mengapa masalah yang diteliti timbul dan penting serta memuat alasan pemilihan masalah tersebut sebagai judul. Bab ini juga berisi perumusan dan pembatasan masalah yang disajikan dalam bentuk pertanyaan untuk mempermudah peneliti mengkaji dan mengarahkan pembahasan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan hasil tinjauan kepustakaan dan kajian teoritis serta telaah dari berbagai referensi yang berhubungan dengan Pemikiran Imam Khomeini Tentang Wilayahul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.

Bab III metode penelitian, yaitu membahas langkah-langkah, metode dan teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mencari sumber-sumber, cara pengolahan sumber serta analisis dan cara penulisannya. Semua prosedur dalam penelitian akan dijelaskan dalam bab ini.

Bab IV Judul dan merupakan isi atau bagian utama dari tulisan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana latar belakang kehidupan, pendidikan dan politik Imam Khomeini, konsep wilayahul Faqih menurut Imam Khomeini, dan aplikasi Wilayahul Faqih Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran.

Bab V Kesimpulan, yang akan mengemukakan jawaban dan analisis peneliti terhadap masalah-masalah secara keseluruhan. Hasil temuan akhir ini merupakan pandangan peneliti tentang inti dari pembahasan penulisan. Selain itu ditambah pula berbagai atribut baku lainnya dari mulai kata pengantar sampai riwayat hidup peneliti. Semua bagian tersebut termuat ke dalam bentuk laporan utuh, setelah dilakukan koreksi dan perbaikan yang diperoleh dari hasil konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi.

